

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KALURAHAN GULUREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

Bisri Mustofa

Korespondensi penulis: bisrimustofa0509@gmail.com
STPMD APMD Yogyakarta

ABSTRACT

This study examines the empowerment of the poor through the Joint Business Group (KUBE: Kelompok Usaha Bersama). This theme is important to study because of the social problems in the form of poverty. This research is a descriptive-qualitative research with the type of study is a case study. The research location is in Gulurejo Village, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Special Region of Yogyakarta. The object of this research is the empowerment of the poor through KUBE. The informant selection technique used is a purposive technique, with nine informants. Data collection technique is observation, in-depth interviews, and documentation. And data analysis technique is an interactive analysis model. The results showed that the empowerment of the poor through KUBE in Gulurejo was carried out in three stages, namely: the awareness stage, the capacity development stage, and the protection stage. There are obstacles in every stages. The people empowerment through KUBE make the member of it be able to fulfill their basic needs, actively take part in all activities in the community and there is improvement in the community income.

Keywords: Community Empowerment, Joint Business Group.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tema ini menjadi penting untuk diteliti karena adanya permasalahan sosial berupa kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE. Teknik pemilihan informan adalah secara purposive, dengan sembilan informan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data memakai model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Gulurejo dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas, dan tahap perlindungan sosial. Terdapat kendala-kendala dalam setiap tahapannya. Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE menjadikan anggota-anggota terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlibat aktif dalam kelompok, serta adanya peningkatan pendapatan usaha kelompok.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Usaha Bersama.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat kompleks dan menjadi

salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam rangka

menanggulangi kemiskinan, Pemda DIY telah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan melalui pembangunan (*development*) untuk mencapai kesejahteraan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Namun, jumlah penduduk miskin masih terus ada, bahkan jumlah penduduk miskin cenderung bertambah di tengah wabah pandemi *Coronavirus Disease 19* (Covid-19). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di DIY tahun 2020 mencapai 12,28 persen atau sebanyak 475,072 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 454.625/kapita/bulan.

Berdasarkan Data BPS tahun 2019 dan 2020 diketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo menempati urutan pertama sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan terbanyak di DIY, yakni 17,39% pada tahun 2019 dan 18,01% pada tahun 2020 masing-masing dengan jumlah 74,62 ribu jiwa (tahun 2019) dan sebanyak 78,06 ribu jiwa (tahun 2020). Kemudian disusul oleh Kabupaten Gunungkidul dengan angka kemiskinan sebesar 16,61 pada tahun 2019 dan 17,07% pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 123,08 ribu jiwa (tahun 2019) dan 127,61 ribu jiwa (tahun 2020).

Besarnya angka kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh

Pemda Kulon Progo, sekalipun Pemda Kulon Progo telah melaksanakan berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Kabupaten Kulon Progo di antaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Batuan Beras Rakyat Miskin (Raskin) atau Beras Rakyat Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Perbaikan Sarana Lingkungan (Sarling), Program Beasiswa, Listrik Bersubsidi, Pengembangan Desa-desa Wisata, Pembentukan Kawasan Industri, Bantuan Sosial Covid-19 dan lain sebagainya. Namun, kemiskinan seakan sulit untuk diatasi dan penduduk miskin tetap terpuruk taraf kehidupannya.

Meskipun demikian pemerintah terus melakukan upaya pembenahan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat regulasi berupa kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat miskin (*pro poor policy*). Kebijakan-kebijakan yang memberikan peluang dan kewenangan kepada masyarakat sampai pada level komunitas terbawah dalam pengelolaan

pembangunan termasuk juga proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil pembangunan. Kebijakan-kebijakan yang memberdayakan masyarakat dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 tahun 2015 pasal 4 menyatakan bahwa yang menjadi tujuan Penanggulangan Kemiskinan adalah: 1). Terwujudnya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap, 2). Tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah, 3). Tercapainya penurunan jumlah pengangguran, 4). Terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah (PD) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penanggulangan kemiskinan, 5). Terwujudnya kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang memungkinkan keluarga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

Mengenai upaya menanggulangi kemiskinan tersebut, Pemda Kabupaten Kulon Progo menaruh perhatian yang sangat besar. Kelima tujuan penanganan kemiskinan dalam Perda tersebut dapat

direalisasikan oleh PD-PD yang berkompoten, dengan penanganan secara lintas sektoral melalui PD-PD terkait misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Sosial PPPA, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan lain sebagainya.

Sejalan dengan kebijakan Pemda Kabupaten Kulon Progo tentang Penanggulangan Kemiskinan, program KUBE digulirkan untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat secara ekonomi dan sosial. Program KUBE dimaksudkan sebagai upaya untuk memberdayakan kelompok masyarakat tidak mampu. Melalui Program KUBE ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin.

Melalui program KUBE, masyarakat diberikan bantuan dana sebagai modal untuk membentuk usaha ekonomi produktif. KUBE beranggotakan warga tidak mampu yang bergabung dalam kelompok untuk melaksanakan ekonomi produktif. Program KUBE partisipasi dan peran aktif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, sehingga masyarakat miskin tidak

semata-mata menjadi obyek program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat miskin secara sadar membentuk kelompok usaha bersama, menentukan dan menyepakati sendiri bentuk kegiatan yang akan mereka laksanakan serta menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang mereka miliki.

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 525 KUBE. Pemda Kulon Progo melalui KUBE berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Meskipun demikian, dalam perkembangannya KUBE-KUBE Kabupaten Kulon Progo mengalami berbagai macam permasalahan. Hasil dari beberapa kajian tentang KUBE menyatakan bahwa mulai dari ditumbuhkan, terdapat KUBE mengalami kematian, KUBE yang tidak berkembang, serta terdapat pula KUBE berhasil. Umumnya permasalahan yang dihadapi oleh KUBE meliputi: kurangnya modal kerja, tidak berfungsinya kepengurusan KUBE, kurang kompaknya anggota KUBE, kurangnya dukungan dari pemerintah, keterbatasannya jaringan kerja, serta rendahnya penggunaan teknologi. Sedangkan potensi yang dimiliki KUBE seperti bahan baku melimpah, keterampilan dari anggota, partisipasi anggota, peluang

pasar, lembaga keuangan, LSM pemerhati kemiskinan.

Melalui Gerakan Bela Beli Kulon Progo, Pemda telah membuka peluang bagi KUBE untuk berkembang. Gerakan Bela Beli Kulon Progo merupakan suatu "ideology" yang menggerakkan dan mensinergikan semua potensi yang ada di Kabupaten Kulon Progo untuk didayagunakan bagi kepentingan masyarakat Kulon Progo. Dukungan Pemda Kulon Progo kepada KUBE diwujudkan dalam bentuk pelibatan KUBE pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada Program BPNT/Sembako tersebut, KUBE ditunjuk sebagai e-Warong, Elektronik Warung Gotong Royong. E-Warong ini merupakan agen BNI 46 sebagai tempat transaksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program BPNT.

Mulai 2016, KUBE Gulurejo memiliki usaha di bidang produksi batik. Semula produksi batik untuk memenuhi permintaan konsumen lokal, saat ini penjual batik berkembang ke luar DIY. KUBE Gulurejo selain memproduksi batik menjadi agen BNI 46 dalam Program BPNT. KUBE berperan sebagai e-Warong, KUBE ini adalah menjadi tempat transaksi dengan KPM di wilayah Gulurejo, dengan menjual komoditas BPNT yang diperoleh dari para suplier seperti beras, telur, daging ayam, ikan laut, ikan air tawar, kacang tanah,

kacang hijau, tahu, tempe, sayuran dan buah-buahan.

Meskipun demikian KUBE Gulurejo dihadapkan dengan permasalahan produksi yang masih terbatas volume dan variasinya, modal usaha yang masih minim jumlahnya, belum memiliki jaringan kerja yang luas, belum tersentuh lembaga keuangan, minimnya kegiatan peningkatan kapasitas anggota, belum optimalnya sinergi antar PD untuk mengembangkan KUBE.

Penelitian bertema pengentasan kemiskinan melalui kegiatan kelompok usaha Bersama telah dilakukan beberapa peneliti, antara lain: Aprilianti dan Astuti (2019), Menakar Keberlanjutan Program KUBE: Peluang dan Tantangan Program KUBE dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal kelompok sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan atau keberlanjutan KUBE di Kelurahan Keparakan tersebut. Faktor pendamping atau Dinas Sosial atau lembaga masyarakat memegang peranan penting akan keberlanjutan KUBE.

Yuliartati (2019) Pemberdayaan Masyarakat Melalui KUBE di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dilakukan dengan lima tahapan, yaitu: 1) tahapan penyadaran melalui sosialisasi dan

Focus Group Discussion (FGD), 2) tahap identifikasi kebutuhan dan perencanaan, 3) pelaksanaan dilakukan dengan pelatihan-pelatihan, 4) tahap pengembangan KUBE melalui media *online* dan pameran-pameran hasil produksi KUBE, dan 5) tahap evaluasi dengan melihat dan mengukur seberapa berhasil program yang dijalankan. Hasil pemberdayaan masyarakat melalui KUBE berupa: terpenuhinya kebutuhan anggota KUBE, peningkatan pendapatan anggota KUBE, dan tingkat partisipasi anggota KUBE.

Ibrahim Imron dkk (2014), Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE, Studi Kasus pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses pemberdayaan masyarakat diawali dengan pembentukan kelompok, melalui 3 tahap, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan bantuan. Semua tahapan didominasi oleh pemerintah. 2) Pengembangan kapasitas dan pengembangan KUBE menggunakan 5 pendekatan yang disingkat 5 P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan). 3) Usaha peternakan sapi dilakukan secara sambilan. Sistem usaha secara sambilan yang bercirikan skala pengusahaan ternak yang relatif kecil, input biaya produksi yang

relatif rendah, kurang berorientasi ekonomi, serta bentuk usaha bersifat pembibitan dan pembesaran. 4) Terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika KUBE, yaitu permasalahan internal kesadaran minoritas anggota kelompok yang masih belum mampu untuk memahami dan menjalankan tujuan kelompok, adanya dualisme pekerjaan pendamping lapangan, kebudayaan dan lingkungan Desa Dawuhan yang kurang mendukung perkembangan ekonomi kelompok, serta pihak pemerintah yang kurang dalam intensitas pengawasan di lapangan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dengan metode penelitian secara kualitatif dan menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE dengan fokus pada tahapan-tahapan dan kendala-kendalanya. Sedangkan penelitian terdahulu fokus pada faktor penyebab kegagalan, peluang dan tantangan serta hasil-hasil pemberdayaan KUBE.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pemda

Kabupaten Kulon Progo DIY melakukan Penanggulangan Kemiskinan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat melalui KUBE. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Kalurahan Gulurejo dan mengetahui kendala-kendala dalam praktek pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus di Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE, Penentuan informance dengan *purposive* sampling, informance terdiri dari: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Daerah program BPNT, Pendamping KUBE Kalurahan Gulurejo, aparat pemerintah Kalurahan Gulurejo, Ketua KUBE, dan anggota KUBE. Data dikumpulkan melalui observasi, interview dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model analisis interaktif dari Milles dan Huberman (1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat melalaui KUBE

KUBE yang berlokasi di Kalurahan Gulurejo, bergerak di bidang pembuatan batik dan Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warung). Pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Gulurejo dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Pertama, Tahap Penyadaran, penerima manfaat KUBE ditumbuhkan kesadarannya agar memiliki kesadaran melakukan perubahan dalam hidupnya. Penumbuhan kesadaran untuk mendorong berpartisipasi aktif dalam kelompok. Penerima manfaat diberikan pengenalan program KUBE melalui sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial PPPA bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial DIY, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Desa Gulurejo. Selain untuk menumbuhkan kesadaran juga dilakukan pemberian bimbingan oleh pendamping KUBE dalam pertemuan-pertemuan rutin setiap bulan. Bimbingan dan pendampingan oleh pendamping KUBE dimaksudkan untuk menumbuhkan tanggung jawab serta kesetiakawanan antar anggota.

Kedua, Tahap Peningkatan Kapasitas. Peningkatan kapasitas dilakukan secara individu dan kelembagaan melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan, semua dilakukan secara informal. Kegiatan yang dilakukan meliputi membatik,

menjahit, pemasaran *online*, bantuan pengembangan, dan bantuan kredit permodalan. *Output* dari peningkatan kapasitas anggota KUBE penerima manfaat sehingga bertambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pekerjaannya.

Dampak dari pendidikan informal anggota-anggota KUBE Gulurejo mampu mengakses informasi dari media massa dan media social. Dari pelatihan ini terjadi perubahan dalam membatik dan penjualan batik sehingga omzet penjualan meningkat. Pembuatan batik yang awal mulanya warisan orang tua, secara turun temurun, sekarang berkembang sesuai perkembangan teknologi dunia batik, demikian halnya dalam pemasaran.

Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2020 bertempat di Kalurahan Gulurejo menyelenggarakan pelatihan membatik bagi anggota-anggota KUBE. Pelatihan ini difokuskan pada teknik mewarnai dan meracik warna. Pelatihan ini, sangat membantu anggota KUBE Gulurejo dalam meningkatkan pembuatan pola gambar, desain, dan ketepatan warna batik.

(Sumber:<https://djpb.kemenkeu.go.id>)

Diunduh tanggal 17 Juni 2021.

Selain itu, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kulon Progo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo, BNI 46 Kantor Cabang Wates, pada tanggal 8 – 9 April 2021 mengadakan pelatihan penjualan secara *online* bertempat di Ruang Sermo Setda Kulon Progo. Pelatihan ini bermanfaat memberikan keterampilan dan pengetahuan anggota-anggota KUBE dalam memasarkan produksi batik. (Sumber: <http://kulonprogokab.go.id>) Diunduh pada tanggal 11 Juni 2021.

KUBE Gulurejo mendapat bantuan penumbuhan dari Kementerian Sosial pada tahun 2016, dan mendapat bantuan pengembangan dari Dinas Sosial DIY pada tahun 2019 masing-masing sebesar Rp 20.000.000; Pemerintah Kalurahan Gulurejo juga memberikan dukungan dengan menyelenggarakan pelatihan menjahit bagi anggota-anggota KUBE pada tahun 2019 dengan alokasi sumber dana APBDes sebesar 38 juta rupiah.

Adapun peningkatan kapasitas melalui pendampingan dilakukan oleh pendamping KUBE Gulurejo. Pendamping KUBE melaksanakan ketugasannya dalam meningkatkan kapasitas anggota-anggota KUBE dengan memberikan bimbingan teknis, motivasi sosial, dan membantu penyusunan laporan KUBE.

Ketiga, Tahap Perlindungan Sosial. Salah satu tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam perlindungan sosial sebagai *service provider*, sebagai penyedia yang dalam hal ini pemerintah mengupayakan dan melakukan tindakan-tindakan pemecahan masalah sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Program perlindungan sosial dilaksanakan oleh pemerintah meliputi: bantuan pangan dan sandang, bantuan kesehatan, bantuan perumahan, bantuan pendidikan, perlindungan dan rasa aman, dan pelayanan sosial.

Tahap Perlindungan Sosial ini, pada level individu, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada anggota-anggota KUBE Gulurejo berupa bantuan sosial program Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan kesehatan (Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan Nasional/PBI JKN), beasiswa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hasil penelitian anggota-anggota KUBE Gulurejo, Mendiro dan Sumurmuling, menunjukkan bahwa sebanyak 20 orang mendapatkan jaminan perlindungan sosial. Sebanyak 13 orang mendapatkan bantuan pangan berupa bansos BPNT/Sembako. Sebanyak 4 orang mendapat PKH. Sebanyak 18 orang mendapat bantuan kesehatan yang ditunjukkan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebanyak 7 anak dari anggota-anggota KUBE yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sedangkan untuk bantuan perumahan, perlindungan dan rasa aman, serta pelayanan sosial tidak mendapatkan. Hal itu dikarenakan, bantuan perumahan dikhususkan untuk warga tidak mampu yang rumahnya tidak layak huni dan bersedia direhabilitasi, sementara rumah-rumah anggota-anggota KUBE rata-rata sudah layak huni. Anggota-anggota KUBE tidak mendapatkan jaminan perlindungan dan rasa aman, jaminan ini dikhususkan bagi warga yang mendapatkan bencana alam, sementara anggota-anggota KUBE tidak ada yang menjadi korban bencana. Anggota-anggota KUBE tidak mendapatkan pelayanan sosial, jaminan ini diperuntukkan bagi kelayan yang dikirimkan ke Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS), panti-panti asuhan anak, panti jompo, dan balai-balai rehabilitasi sosial lainnya. Sementara, anggota-anggota KUBE tidak termasuk dalam kriteria orang-orang yang perlu mendapat pelayanan sosial.

Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada KUBE Gulurejo pada level kelompok berupa bansos KUBE, penumbuhan tahun 2016 dari Kementerian Sosial RI dan pengembangan tahun 2019 dari Dinas Sosial DIY. Selain bansos, Pemda Kulon Progo juga melibatkan KUBE pada Program Bantuan Pangan Non Tunai melalui e-Warong dalam kerangka Bela Beli Kulon Progo.

Pemda Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Sosial PPPA Kabupaten Kulon Progo memberikan kebijakan kepada sebanyak 113 KUBE di Kabupaten Kulon Progo untuk menjadi e-Warong, di antaranya adalah KUBE Gulurejo (Mendiro dan Sumurmuling). Dengan demikian, KUBE Gulurejo memiliki peran ganda sebagai KUBE yakni KUBE Batik dan sekaligus sebagai KUBE e-Warong. KUBE e-Warong bertugas untuk mendistribusikan bantuan sosial pangan (BPNT) bagi sebanyak 49 ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sumber dana APBN dan 5 ribuan KPM dari APBD, dan 30 ribuan peserta PKH.

Kucuran dana BPNT/Sembako disalurkan kepada KPM telah menyerap sekitar 10 hingga 16,8 milyar rupiah perbulan, hal tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Kulon Progo dan membantu meringankan beban ekonomi warga tidak mampu. KPM mendapat bantuan beras, daging ayam, ikan, tahu tempe, sayuran dan buah-buahan, komoditas program semuanya diambilkan dari hasil bumi Kulon Progo. BPNT juga menguntungkan *stakeholders* yang terlibat di seluruh Kabupaten Kulon Progo, misalnya Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai penyedia beras, Kelompok Wanita Tani (KWT) sebagai penyedia sayuran dan buah-buahan, pemasok daging ayam, telur, lele, ikan, juga pemasok tahu tempe. Program BPNT sebagai “berkah” bagi masyarakat Kulon Progo, perputaran uang dapat diserap oleh masyarakat Kulon Progo dan dipergunakan kembali untuk kesejahteraan masyarakat Kulon Progo, hal tersebut sekaligus juga sebagai berkah bagi KUBE Gulurejo.

KUBE Gulurejo baik Mendiro maupun Sumurmuling mendapatkan keuntungan yang besar dari program BPNT/Sembako di Kulon Progo. Berdasarkan catatan laporan keuangan KUBE Mendiro dan Sumurmuling selama satu tahun pada tahun 2020 omzet penjualan

KUBE e-Warong bruto mencapai 728,6 juta rupiah sampai 1,1 milyar rupiah atau rata-rata per bulannya 90 juta sampai 104 juta rupiah. Keberhasilan Usaha KUBE Gulurejo ini tidak berdiri sendiri, Program BPNT/Sembako merupakan jerih payah bersama, sinergi, antara pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan juga pemerintah kalurahan, serta *stakeholders* lainnya penyedia komoditas: Gapoktan, KWT, pemasok telur, daging ayam, ikan, dan tahu tempe.

2. Kendala-Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Proses pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Gulurejo dalam perjalanannya tidak selalu berjalan lancar. Terdapat kendala-kendala yang menghambat pemberdayaan tersebut pada setiap tahapan.

Kendala yang dijumpai pada tahap penyadaran: 1). Semula sosialisasi program belum bisa diterima oleh anggota KUBE, sebagaimana anggota KUBE belum mengerti tujuan didirikannya KUBE, akibatnya anggota KUBE belum sepenuhnya dapat berperan dalam kelompok, sehingga pendamping KUBE perlu memberikan bimbingan secara intensif untuk memberikan penyadaran dan pengertian kepada anggota KUBE., 2). Munculnya konflik internal antara anggota KUBE karena perbedaan pandangan dan

perbedaan ide dalam pengelolaan KUBE. Contoh bentuk konflik dalam hal belanja barang, pengaturan keuangan, membangun kemitraan dan jaringan kerja. Dampak konflik ketua beserta anggota KUBE kesulitan menyamakan persepsi dan gerak langkah yang padu karena ego anggota-anggota KUBE. Untuk mengatasi masalah ini, pendamping KUBE berperan sebagai mediator., 3). Data kemiskinan dalam DTKS mengandung error, data bersifat *inclusion error* dan *exclusion error*, serta adanya "permainan" aparaturnya dalam menentukan hasil musyawarah. DTKS merupakan data terpadu yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan intervensi penanggulangan kemiskinan. Data yang berasal dari BPS tersebut sebagian menyimpan kesalahan yakni orang yang seharusnya didata, karena tidak mampu, akan tetapi pada kenyataannya tidak didata dalam DTKS. Demikian pula sebaliknya, orang-orang yang tergolong mampu ternyata masuk dalam data. Selanjutnya, tentang mekanisme pengusulan baru bagi warga yang belum masuk DTKS, dapat diusulkan melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kalurahan. Elit-elit Kalurahan Gulurejo, dukuh, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh politik memiliki kepentingan untuk memperjuangkan para pendukungnya masuk DTKS, sehingga dapat dipastikan

usulan baru DTKS hasil Musyawarah Desa/Kalurahan adalah orang-orang pilihan elit-elit Gulurejo. Sementara orang-orang yang jauh dari lingkaran kekuasaan elit Gulurejo termarjinalkan. Hasil Musyawarah Desa/Kalurahan DTKS dikirim ke Dinas Sosial Kulon Progo dalam suatu berita acara, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo akan menindaklanjuti dengan mengirimkan usulan DTKS kalurahan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI, untuk diterbitkan SK Menteri terbaru DTKS.

Kendala pada tahap peningkatan kapasitas: 1). Pada pelatihan membuat batik di anggota KUBE kesulitan dalam membuat pola dan meracik warna yang sesuai. Batik merupakan seni bermutu tinggi, untuk membuat hasil yang bagus tidak sembarang orang dapat melakukannya. Perlu pelatihan dan praktik terus menerus untuk menghasilkan batik yang bernilai seni. Kegiatan pelatihan membuat batik dan meracik warna, anggota-anggota KUBE Gulurejo dibimbing oleh instruktur dalam membuat pola, desain dan cara mengatur komposisi warna yang tepat, agar hasil membuat batik dapat nampak indah dan *marketable*, *kemedol*. Setelah selesai pelatihan anggota KUBE berlatih membuat batik melalui praktek secara terus menerus, sampai pada akhirnya anggota-anggota KUBE berhasil

membuat pola dan membuat kombinasi warna. 2). Pada pelatihan pemasaran *online*, sebgaiian anggota KUBE gagap teknologi, sehingga mereka merasa perlu mengirimkan personel dari kalangan anak muda (anak atau saudara) untuk mengikuti pelatihan pemasaran *online*. Umumnya anggota KUBE Gulurejo adalah warga *ndeso*, yang kurang mengenal tentang *handphone, gadget, internet, computer, laptop, media social, whatapp (WA), facebook, instagram, twitter*, dengan melibatkan anak yang melek informasi teknologi (IT) ke dalam pelatihan pemasaran secara *online*, KUBE Gulurejo bisa mengatasi kendala tersebut.

Sedangkan kendala tahap perlindungan sosial, yaitu: 1) Terdapat warga tidak menerima bantuan BPNT mencemburui anggota-anggota KUBE yang mendapat bantuan. Warga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial BPNT iri hati dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Mereka iri hati, mengatakan mengapa dirinya tidak mendapatkan bantuan sementara anggota-anggota KUBE mendapatkannya. Terlebih ketika hari pencairan bantuan di e-Warong dilaksanakan, banyak KPM yang mengantri dan pulang dengan membawa sembako bantuan, hal itu semakin membuat mereka semakin iri. Mereka pernah mengadakan hal tersebut ke kalurahan, juga ke Dinas

Sosial Kulon Progo, namun setelah dicek di DTKS nama-nama mereka tidak ada, atau statusnya mampu, atau tidak mampu tetapi tidak mendapatkan. 2). Terdapat anggota KUBE Gulurejo tidak dapat menggunakan kartu KIS yang dimiliki karena kepesertaannya dipergunakan orang lain. Hal ini terjadi karena nama sama akan tetapi NIK dan alamat berbeda. Pendamping Desa (KPKD) mengurus masalah ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kulon Propgo untuk membetulkan NIK, dan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk tindakan selanjutnya, 3). Terdapat indikasi KUBE mengalami ketergantungan pada program pemerintah, akibat mendapatkan kemudahan/fasilitas dalam program BPNT/Sembako. KUBE Gulurejo ditunjuk oleh Pemda Kulon Progo (Dinas Sosial) sebagai e-Warong dan semenjak menjadi e-Warong KUBE Gulurejo mendapatkan fasilitas dan kemudahan kemudahan dari pemerintah. Selain mendapatkan bantuan modal dan fasilitas pendukung, KUBE e-Warong Gulurejo diberikan kebebasan untuk bekerja sama dengan supliyer pemasok komoditas BPNT/Sembako manapun yang disukai, termasuk e-Warong dijamin mendapatkan pembeli, pangsa pasar sudah tersedia dari KPM yang akan mengambil bantuan sosial secara non tunai. Tentunya fasilitas dan kemudahan ini bisa

menjadikan KUBE Gulurejo mengalami ketergantungan yang besar, apabila program dihentikan atau KUBE tidak lagi menjadi e-Warong maka KUBE Gulurejo akan mengalami *collapse*.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo melibatkan banyak *stakeholders*, yakni pemerintah pusat, propinsi, daerah, kalurahan serta masyarakat. KUBE Gulurejo dibesarkan oleh Pemda Kulon Progo bersama *stakeholders* lainnya dengan keterlibatannya pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako, dalam Program ini peran KUBE sebagai e-Warong tempat pendistribusian komoditas untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KUBE Gulurejo mendapatkan pemasukan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota yakni rata-rata 90 sampai 104 juta rupiah setiap bulan. Dari hasil mendistribusikan bahan pangan program BPNT/Sembako menunjukkan ada sinergi antar *stakeholder* hal ni sebagai bukti keberhasilan meningkatkan pendapat anggota. Meskipun demikian, pemberdayaan KUBE Gulurejo masih dihadapkan dengan kendala di level individu, kelompok, maupun kelembagaan. Kendala-kendala tersebut,

saat ini masih dapat diatasi dengan adanya pendampingan oleh pendamping KUBE, Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial. Namun, masih ada kendala yang sangat mendasar adalah adalah membuat KUBE menjadi berdaya. Keberhasilan KUBE Gulurejo dalam usaha saat ini karena mendapat fasilitas dan kemudahan dari pemerintah. Sehingga KUBE Gulurejo masih memiliki ketergantungan yang besar pada Program BPNT/Sembako. Oleh karena itu, agenda ke depan adalah membangun kemandirian KUBE. KUBE Gulurejo harus bisa mandiri, lepas dari ketergantungan pada program pemerintah, bisa bersaing bebas dengan pelaku ekonomi lainnya. Jika tidak, KUBE Gulurejo akan tenggelam manakala program BPNT/Sembako berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianti, Laras, dan Eka Zuni LusiAstuti, Menakar Kelanjutan Program KUBE: Peluang dan Tantangan Program KUBE dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20 Nomor 1 April 2019.

<http://kulonprogokab.go.id>, Lima Perwakilan KUBE Gulurejo Terima Penguatan Modal Guna Kembangkan Usaha Produktif di

- Masa Pandemi. Diunduh pada tanggal 11 Juni 2021.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/10495>, Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Batu Bata untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Mantaren II Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah). Diunduh pada tanggal 16 Maret 2021.
<https://bps.go.id>, Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota 2019-2020. Diunduh tanggal 16 Maret 2021
<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/diy/id/data-publikasi/berita-terbaru/2915-berdayakan-kube-di-kulon-progo,-kanwil-djpb-diy-gelar-pelatihan-membatik-pewarnaan-dan-meracik-warna.html>.
Diunduh pada 17 Juni 2021
- Ibrahim Imron dkk, Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama, Studi Kasus pada Kelompok Usaha Bersama di Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2 No. 3 tahun 2014.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M., 1994. *Qualitatif Data Analysis: A Source book of new method*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran BPNT
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
Yuliartati, Isti'ana, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama di Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Madani* Volume 4 No 2 Tahun 2019.